TAJUK RENCANA

Pelaku Wisata Bertahan di Masa Pandemi

NYARIS tak ada sektor kehidupan masyarakat yang luput dari dampak pandemi Covid-19. Tak terkecuali sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk di kota/kabupaten di DIY. Sejak pandemi, sektor pariwisata terpuruk hingga mempengaruhi pendapatan, bukan hanya pelaku usaha pariwisata, tapi juga masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.

Dalam situasi demikian, pemerintah daerah terus berupaya membantu para pelaku usaha agar terus bertahan di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah objek wisata pun mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekalipun masih dalam tahap uji coba, namun animo masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata tak juga surut. Untuk itulah kemudian diatur agar pengunjung tidak melebihi kuota yang ditentukan, atau paling banyak separoh dari kunjungan biasa.

Lambat laun sektor pariwisata mulai bergerak, namun tetap saja belum bisa optimal. Apalagi, DIY kembali memperpanjang masa darurat untuk sebulan ke depan. Artinya, sektor pariwisata juga harus bisa menyesuaikan dan tak bisa membuka secara penuh bagi semua pengunjung. Apalagi, wisatawan yang berasal dari zona merah, sementara dibatasi untuk berkunjung guna mencegah penyebaran Covid-19.

Berkaitan tuntutan ekonomi untuk terus bertahan dan di sisi lain menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terinfeksi Covid-19, para pelaku biro perjalanan dan travel agent di DIY harus membuat terobosan-terobosan. Seperti dilakukan pelaku biro perjalanan dan travel agent di DIY yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menggulirkan program liburan di daerah asal atau *staycation*. Program ini membidik wisatawan lokal atau nusantara agar industri pariwisata di DIY terus bergerak.

Kalau mau jujur, tingkat kunjungan wisatawan lokal atau nusantara sebenarnya cukup tinggi. Setelah cukup lama berdiam diri di rumah, mereka seakan jenuh dan ingin menikmati liburan di tempat wisata. Mereka juga paham, untuk berwisata tidak harus pergi jauh ke luar wilayah, namun cukup berwisata lokal yang tak kalah menarik dengan objek wisata di luar daerah. Alhasil, destinasi wisata pun dipenuhi wisatawan lokal.

Tentu ini fenomena menarik dan tak perlu dikhawatirkan sepanjang pengelola menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pengelola tak cukup hanya sekadar menegur mereka yang kedapatan tak memenuhi protokol kesehatan, tapi juga mengeluarkan mereka dari area tempat wisata bila membandel. Justru dengan tindakan tegas ini akan meningkatkan kepercayaan publik sehingga tidak merasa takut berkunjung. Penerapan protokol pencegahan Covid-19 justru menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut.

Barangkali itulah cara pelaku pariwisata untuk bertahan hidup, ekonomi tetap bisa bertahan dan kesehatan masyarakat pun tetap terjaga. Jika demikian, pandemi bukanlah alasan untuk hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, sebaliknya menjadi tantangan untuk bikin terobosan agar sektor pariwisata terus bergerak. ❑

Yogya, Tantangan Menuju Titik 'Jenuh'

Saratri Wilonoyudho

HUT Kota Yogyakarta ke-264 menjadi pijakan untuk selalu mengevaluasi diri. Agar kota yang sudah mendunia ini ke depan tetap menjadi kota idaman, setidaknya layak huni. Tandanya, antara lain : mutu tata kota, ketersediaan ruang hijau, semakin bersih, minim sampah dan pencemaran, angkutan umum yang nyaman aman, kondisi jalan yang bagus, pedestrian yang memanjakan pejalan kaki, kelancaran lalu lintas. Juga biaya hidup terjangkau, tidak ada kriminalitas, ketersediaan fasilitas sosial, perlindungan bangunan bersejarah dan sebagainya.

Kota Yogya memang menghadapi tantangan, terutama akan menuju titik 'jenuh'. Data BPS (2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Yogya meningkat sepanjang 2016 hingga 2020, yakni 417.744 jiwa, 422.732 jiwa, 427.498 jiwa, 431.939 jiwa dan menjadi 435.936 jiwa. Nampak bahwa tingkat *in migration* Kota Yogya memang tinggi.

Karenanya wajar jika pertumbuhan kota kini menuju ke arah luar dan fakta seperti ini menunjukkan adanya *gentrifikasi*. Yakni 'kejenuhan' di kawasan pusat kota dan mereka berpindah ke pinggiran kota, atau menurut Geyer and Kontuly (1993), disebut memasuki tahap *advanced primate city*.

Kriminalitas

Para ahli ilmu sosial mengatakan ada kaitan antara urbanisasi, kemiskinan kota, kriminalitas dan konflik-konflik sosial politis. Demikian pula ke depan perlu antisipasi untuk meredam konflik sosial, degradasi moral, kerusakan lingkungan, peningkatan angka kriminalitas, dan sebagainya.

Hal yang patut disyukuri, Kota Yogya memiliki tradisi budaya (Jawa) yang kuat. Sehingga diharapkan bisa memaksimalkan potensi ini untuk meredam dan mengurangi beban seluruh penduduk kota agar nyaman lahir dan batin. Tingkat kenyamanan masyarakat setidaknya dapat diukur dari tiga indikator penting, yakni kerusakan lingkungan, kriminalitas dan minimnya fasilitas sosial.

Selain budaya, lingkungan fisik berupa 'ruang aktivitas sosial' tetap harus diperhatikan. Meskipun Yogya nanti akan berkembang demikian padat. Sehingga rasa aman dan nyaman tetap ada. Roger Trancik dalam *Finding Lost Space* (1986), menyatakan bahwa pada kota-kota moderen, banyak dijumpai apa yang disebut *lost space*, yakni suatu ruang atau *landscape* perkotaan yang tidak terstruktur, tidak terencana, tidak dimanfaatkan dan tidak dipelihara. Pudarnya kekentalan komunitas atau kolektivitas sosial terhadap ruang perkotaan ini, akhirnya hanya menyebabkan rasa tidak aman.

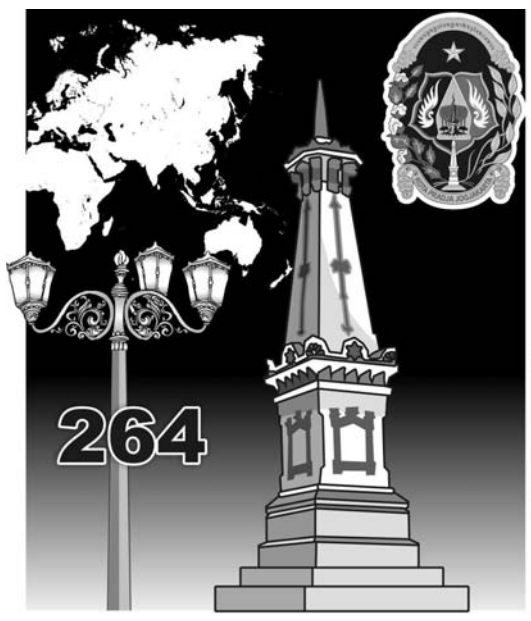

KR-JOKO SANTOSO

Kelebihan Kota Yogyakarta adalah masih eksisnya keberadaan kampung-kampung kota. Karenanya ini harus dijaga jangan digantikan massalisasi, komodifikasi, monotonisasi wajah kota ini, dan wajah kapitalistik serakah lainnya. Agar Yogyakarta masa mendatang tidak kehilangan rohnya. Keberadaan kampung-kampung kota tersebut bagaikan mosaik kultural yang memperkaya dan memberi roh wajah kota, lengkap dengan berbagai budaya khasnya.

Perlu Perencanaan

Selain sebagai 'bungker' budaya, Kampung Kota merupakan sistem ekonomi yang dinamis, dan mereka menjadi pendukung kegiatan ekonomi kota yang sangat penting. Dalam konteks perumahan perkotaan, kampung kota tersebut merepresentasikan *housing autonomy*, karena mereka menentukan sendiri kebebasan dan otoritas untuk menciptakan lingkungan kultural kehidupannya. Kampung kota merepresentasikan kemerdekaan jiwa dan semangat warga kota, yang disebut John Turner sebagai *housing as a process, as a verb* (Setiawan, 2010).

Pertumbuhan Yogyakarta yang demikian pesat tersebut pada akhirnya memerlukan perencanaan strategis untuk diimplementasikan guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mendesak untuk ditekankan karena meskipun semua provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia telah memiliki rencana tata ruang, namun dalam implementasinya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kenyataan ini berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang tidak melalui mekanisme yang benar (Soedradjat, 2000).

Selamat Ulang Tahun Kota Yogyakarta. ❑

) **Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho MSi, Ketua Koalisi Kependudukan dan Sekretaris Dewan Riset Daerah Jawa Tengah.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email *pikiranpembaca@gmail.com*. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Meniti Fungsi Ringroad

SAYA kira kita semua sudah pernah melewati ringroad, jalan yang melingkari wilayah Yogya, karena tujuan jalan ini memang untuk memudahkan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kita juga tahu dan paham bahwa jalan ringroad ini berlaku dua arah, dan dibagi dua jalur pada setiap arah, yaitu jalur lambat yang digunakan bagi pengendara motor, sepeda, dan jalur cepat yang digunakan untuk pengendara mobil dan kendaraan roda empat lainnya.

Regulasinya pun sudah jelas, kendaraan bermotor dilarang masuk ke jalur cepat, karena selain berbahaya juga tidak seimbang dengan kendaraan yang lain, kecuali untuk kebutuhan putar balik atau pindah jalur.

Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, memang benar bahwa jalur lambat beriring dengan tujuan tempat kerja maupun hunian kita masing-masing. Hal ini mengakibatkan terkadang kendaraan roda empat harus masuk ke jalur lambat karena tujuannya adalah di sisi kiri jalur lambat ini. Pada dasarnya, pengendara motor tidak terganggu dengan hal ini, kita masih mencoba memberikan toleransi terhadap hal ini, dengan tetap memberikan akses kepada pengendara lain masuk ke jalur lambat.

Namun yang terjadi sekarang sangat bertolak belakang dengan fungsi ringroad. Akhir-akhir ini banyak kendaraan roda empat yang masuk ke jalur lambat bukan karena tujuannya berada di sisi kiri jalur lambat, melainkan untuk menghindari kemacetan di jalur cepat. Hal ini terlihat pada jam-jam sibuk maupun pada saat musim liburan. Pengendara mobil bahkan truk masuk ke jalur lambat untuk menghindari kemacetan dan antrian kendaraan di jalur cepat. Analisis yang muncul adalah apakah pengendara mobil terbebas dari kemacetan? Apakah pengendara mobil sadar bahwa ketika masuk ke jalur lambat menghindari kemacetan justru menimbulkan masalah kemacetan baru bagi pengendara roda dua. Bayangkan saja, jalur lambat dengan lebar dua meter itu harus dimasuki mobil atau truk bahkan terkadang bus, yang rata-rata lebar kendaraan 1,5 sampai 2 meter. Sekilas memang terlihat pengendara mobil bebas dari antrian mobil yang lain, namun bagaimana dengan pengendara motor yang merasakan kemacetan luar biasa di jalur lambat. Kenapa sekarang pengendara motor yang harus antri?

Apakah tidak lebih bijaksana apabila kita alami kemacetan pada rute yang memang harus kita lalui? Bukan dengan cara terobos rute lain, untuk sejenak 'menghindar' dari kemacetan, karena kenyataannya tetap terjadi kemacetan di jalur lambat dan jalur cepat, atau memang ini sebuah arogansi dari pengendara mobil yang ingin semua perjalanan lancar tanpa 'halangan' kemacetan?

Sebuah solusi sederhana saya tawarkan kepada pengendara mobil, apabila memang tidak mau ada nuansa kemacetan yang berlebihan, kenapa tidak beralih saja ke fasilitas taksi online? Kenapa tidak beralih saja ke fasilitas Trans Jogja? Meskipun tetap akan ada kemacetan, namun paling tidak sudah mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di ringroad.

Demikian sedikit analisis dari saya selaku pemakai jalan ringroad, marilah sama-sama mewujudkan kenyamanan berkendara di jalan, bukan hanya untuk kepentingan individu, namun untuk kepentingan dan kenyamanan bersama.

***Felix Alang Bayu Purba Ssos**, Universitas Atma Jaya Yogya.*

Mencari Obat Penawar Resesi

Tasroh

RESESI ekonomi di Indonesia tinggal menunggu pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) seputar kinerja perekonomian nasional pada triwulan ketiga. Dari proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan level pertumbuhan ekonomi bakal bercokol pada kisaran minus 2,9% hingga minus 1% pada kuartal ketiga. Dengan demikian, Indonesia resmi memasuki masa resesi ekonomi.

Bank Dunia dalam rilisnya 23 September menegaskan, perekonomian sebuah negara disebut mengalami resesi apabila selama dua kuartal secara berturut-turut mencatatkan pertumbuhan minus. Bagi masyarakat awam timbul sebuah pertanyaan sederhana, bila Indonesia masuk dalam jurang resesi apa yang akan terjadi?

Pertanyaan ini sederhana, tetapi mendasar dan perlu jawaban atau penjelasan yang akurat sehingga tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Tentu penjelasan secara sederhana, bila terjadi resesi ekonomi, maka kondisi perekonomian nasional mengalami pelemahan yang signifikan dan berdampak pada pelemahan daya beli. Lalu diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif, dan pada ujungnya adalah meningkatnya angka kemiskinan. Pertanyaan selanjutnya yang sulit dijawab adalah sampai kapan resesi ini berlangsung?

Bantuan Langsung

Untuk mengurangi dampak resesi ekonomi, sejumlah ekonom menawarkan kepada pemerintah beberapa 'obatí penawar. Di antaranya ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial terutama bantuan langsung tunai (BLT) kepada lebih banyak penerima yang membutuhkan. Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengusulkan penghentian penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang pencairannya terlalu kecil. Dana PEN sebaiknya dialihkan menjadi BLT untuk usaha mikro dan ultramikro (UMKM).

Bersamaan peningkatan jumlah dan model stimulus pelaku usaha atau proyek padat karya, yang telah menyedot Rp 132 triliun selama pandemi ini, tak kalah strategis adalah upaya sistemik mengawasi penggunaan dana stimulus. Disinyalir sekitar 65% justru tidak didayagunakan untuk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing produk lokal-nasional, tetapi justru dibelanjakan untuk kegiatan konsumtif.

Praktik tak cerdas bisa dilihat di Jawa Tengah. Sebanyak 1,2 juta pelaku UMKM yang mendapat stimulus permodalan dari pemerintah, setelah dicairkan justru untuk belanja kebutuhan konsumtif. (Sindo, 22/9). Jadi maksud hati membantu peningkatan permodalan usaha UMKM namun tanpa sistem pengawasan ketat dan terintegrasi, dana negara itu sia-sia, hilang tanpa makna.

Tidak Sesuai

Fakta membuktikan, anggaran PEN sebesar Rp 695 triliun yang diharapkan dapat menghidupkan mesin pertumbuhan ekonomi guna menghadang resesi ekonomi ternyata tidak sesuai harapan. Tingkat penyerapan dana PEN belum mencapai separuh angka yang dianggarkan, baru terserap Rp 240,9 triliun. Di antaranya Rp 87,5 triliun digelontorkan Satuan Tugas (Satgas) PEN. Dana negara itu juga dirancang untuk investasi sosial yakni penguatan kohesi sosial membangun spirit kebangsaan.

Dari pengalaman selama ini, obat penawar resesi sejatinya bukanlah terletak pada ketersediaan dana negara atau swasta. Tetapi justru kepastian dan pengawasan ketat atas pemanfaatan dana-dana pemulihan ekonomi tersebut.

Lalu bagaimana masyarakat menyikapi resesi ekonomi? Pertama, jangan panik menghadapi situasi. Selain itu, mengurangi tingkat konsumsi yang berlebihan, termasuk menunda membeli barang yang sifatnya sekunder sebagai antisipasi bila resesi berlangsung lama. Jangan lupa menyiapkan dana darurat sebagai kesiapan bila terkena PHK atau berbagai bencana lainnya di tengah bencana kesehatan covid 19 ini. Itulah obat mujarab mengerem resesi ekonomi, termasuk mencegah resesi investasi. ❑

) **Tasroh MPA MSc, Tim Pengembangan Ekonomi-Investasi Daerah dan Alumni Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan).*

Pojok KR

Cegah Covid-19 di objek wisata, tegakkan protokol kesehatan.
-- Pengelola wisata harus tegas.

***

Paslon mulai manfaatkan masa kampanye.
-- Paling aman tentu di medi massa.

***

Aksi menolak pengesahan UU Cipta Kerja terus berlanjut.
-- Hak menyampaikan aspirasi dilindungi konstitusi.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.